

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN SEBAGAI INFORMASI MEMPEROLEH BAHAN AJAR YANG KREAKTIF

Dhenny Asmarazisa

Dosen Tetap Prodi Manajemen Fak. Ekonomi Universitas Riau Kepulauan Batam

SINOPSIS

Paparan sejarah lahirnya Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi ini secara ringkas dapat diuraikan sebagai berikut : agar kreatif menggunakan bahan ajaran bagi pengajar pendidikan Kewarganegaraan dapat membuat lompatan memungkinkan untuk memandang segala sesuatu dengan info-info yang baru. Akan Nampak pada istilah-istilah baru untuk proses penyelesaian pengajaran agar dapat berpikir vertical membuat anda bergerak selangkah demi selangkah menuju pengajaran yang baik, berpikir lateral melihat dari sudut pandang akan memberikan informasi terbaru, berpikir kritis untuk berlatih atau memasukkan penilaian atau evaluasi yang cermat, seperti menilai kelayakan suatu gagasan atau prodak, berpikir analitis menguji setiap kegiatan untuk melihat bagaimana bagian-bagian ini dapat dikombinasikan dengan pengetahuan social lainnya, berpikir strategis dapat mengembangkan untuk perencanaan dan arahan pengajaran yang berkembang menjadi pengetahuan yang objektif ilmiah, Berpikir tentang hasil meninjau pengajaran menuju tugas dari perspektif ajaran yang dikehendaki, berpikir kreatif dapat menyusun bahan ajaran berdasar fakta-fakta yang ada pada ilmu pengetahuan lainnya menjadi pandangan baru.,yang membahas tentang manusia selain sebagai makhluk Individu yang mempunyai karakter khas masing-masing sehingga berbeda dengan manusia yang lain, selain makluk individu manusia juga sebagai makluk social. Sebagai makluk social manusia selalu berkelompok dan berinteraksi dengan manusia yang lainnya dalam wadah keluarga, Bangsa dan Negara, dan berbagai macam kelompok lainnya misalnya organisasi. Oleh karena itu dalam bahasan ini juga dibahas tentang interaksi social dan bentuk-bentuk interaksi social. Pada bahan ajaran ini juga dibahas tentang kepribadian manusia, mulai dari dasar-dasar teori hingga proses pembentukan kepribadian manusia. Selajutnya dipaparkan kajian tentang sosialisasi, internalisasi sebagai suatu proses pembentukan kepribadian manusia. Menjadi bahan ajar Pendidikan Kewarganegaraan yang berinovatif, kreatif, dan wawasan Kebangsaan sesuai dengan keinginan UU RI No. 20 Tahun 2003 serta sistim pendidikan di Indonesia yang tidak bertentangan dengan paham-paham Ketatanegaraan menjadi alas / dasar kepribadian bangsa.

A. PENDAHULUAN

Sejarah lahirnya Pendidikan Kewarganegaraan berawal dari pelajaran sejarah panjang bangsa Indonesia yang dimulai sejak dari perebutan dan mempertahankan kemerdekaan samapai pada pengisian kemerdekaan, bahkan terus berlangsung hingga jaman reformasi. Kondisi perebutan dan mempertahankan kemerdekaan itu ditanggapi oleh bangsa Indonesia berdasarkan kesamaan nilai-nilai tersebut dilandasi oleh jiwa, tekad dan semangat kebangsaan, kesemuanya itu tumbuh dan berkembang menjadi kekuatan yang mampu mendorong proses terwujud Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Apresiasi menimbulkan rasa senang, sayang cinta, keinginan untuk memelihara melindungi atau membela. Pendidikan Kewarganegaraan diselenggarakan untuk membekali para peserta didik selaku calon pemimpin di masa depan dengan kesadaran bela Negara serta kemampuan berpikir secara komprehensif integral dalam rangka ketahanan nasional kesadaran bela Negara ini terwujud sebagai kerelaan dan kesadaran melangsungkan hidup bangsa dan Negara melalui

bidang profesinya kesadaran bela Negara, dengan demikian kesadaran bela Negara mengandung arti :

1. Kecintaan kepada tanah air.
2. Kesadaran berbangsa dan bernegara.
3. Keyakinan akan Pancasila dan UUD 1945.
4. Kerelaan Berkorban bagi bangsa dan Negara.
5. Sikap dan prilaku awal bela Negara.

Memahamin juga tentang empat pilar kebangsaan sesuai dengan Amademen 1998-2001 UUD 1945 yaitu:

1. Pancasila.
2. UUD 1945.
3. Negara Kesatuan Republik Indonesia serta sekarang yang terlupakan
4. Bheneka Tunggal Ika.

Kemampuan berpikir komprehensif intergral adalah kemampuan untuk berpikir tentang sesuatu dalam kaitannya dengan keseluruhannya jika kita melihat suatu peristiwa di masyarakat kita tidak memandang peristiwa itu menurut pandangan individu/golongan, melainkan berdasarkan pandangan/kepentingan bersama yaitu kepentingan masyarakat/bangsa dari berbagai aspek kehidupan.

Perjalanan panjang sejarah bangsa Indonesia yang dimulai sejak era sebelum dan selama penjajahan kemudian dilanjutkan dengan era perebutan dan mempertahankan kemerdekaan samapai hingga era kemerdekaan menimbulkan kondisi dan menuntut yang berbeda sesuai dengan zamannya. Kondisi dan tuntutan yang berbeda tersebut dianggapi oleh bangsa Indonesia berdasarkan kesamaan nilai-nilai perjuangan bangsa yang senantiasa tumbuh dan berkembang. Kesamaan nilai-nilai tersebut dilandasi oleh jiwa tekad dan semangat kebangsaan. Kesamaan itu tumbuh menjadi kekuatan yang mampu mendorong proses terwujudnya Negara kesatuan Republik Indonesia dalam wadah nusantara.

Nilai-nilai perjuangan bangsa Indonesia dalam perjuangan fisik merebut, mempertahankan dan mengisi kemerdekaan telah mengalami pasang surut sesuai dengan dinamika kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara. Semangat perjuangan bangsa tidak mengalami penurunan pada titik yang kritis hal ini disebabkan antara lain oleh globalisasi. Globalisasi ditandai oleh kuatnya pengaruh lembaga-lembaga kemasyarakatan internasional Negara-negara maju yang ikut mengatur peraturan perpolitikan perekonomian social budaya serta pertahanan keamanan global kondisi ini menimbulkan berbagai konflik kepentingan antara Negara berkembang dan lembaga Internasional maupun antara Negara berkembang.

Perjuangan non fisik sesuai dengan bidang profesi masing-masing tersebut memerlukan sarana kegiatan pendidikan bagi setiap warga Negara Indonesia pada umumnya dan peserta didik sebagai calon cendikiawan pada khususnya melalui pendidikan Kewarganegaraan. Semangat perjuangan bangsa yang tak kenal menyerah telah terbukti dalam perang kemerdekaan 17 Agustus 1945. Semangat tersebut dilandasi oleh keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan di iklaskan untuk berkorban. Landasan perjuangan tersebut merupakan nilai-nilai perjuangan bangsa Indonesia.

Semanagt perjuangan bangsa merupakan kekuatan mental spiritual yang dapat melahirkan sikap patriot dan kekuatan kebangsaan inilah harus dimiliki oleh setiap orang bangsa Indonesia. Nilai-nilai perjuangan bangsa Indonesia dalam merebut, mempertahankan dan mengisi kemerdekaan, telah mengalami pasang surut sesuai dengan dinamika kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Semangat perjuangan bangsa yang merupakan kekuatan mental spiritual telah melahirkan kekuatan yang amat menajubkan dalam masa perjuangan fisik. Dalam menghadapi globalisasi dan mantap masa depan untuk mengisi kemerdekaan, bangsa Indonesia memerlukan pejuang non fisik sesuai dengan bidang profesi masing-masing. Perjuangan non fisik tersebut memerlukan sarana kegiatan Pendidikan bagi

setiap Warga Negara Indonesia pada umumnya melalui Pendidikan Kewarganegaraan yang dahulu lebih dikenal dengan sebutan “ Kewiraan “.

B. CIVIC MENJADI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN, KEWIRAAN dan NAMA CIVIC EDUCATION DI BEBERAPA NEGARA.

Civic mula-mula dipelajari di AS tahun 1790. Civic digunakan bangsa America Serikat untuk menyatukan bangsa America Serikat yang terdiri dari berbagai suku bangsa imigran Asia, Eropa, Africa, Australia dan lain-lain yang datang, hidup dan menetap di America Serikat. Istilah menyatukan bangsa America Serikat di kenal dengan istilah : Theory of Americanization. Civic diajarkan di Indonesia secara resmi tahun 1948 setelah Indonesia Merdeka. Tujuan pengajaran Civics untuk menyatukan bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku bangsa, etnis, agama, kebudayaan, dan bahasa yang berbeda-beda. Tahun 1954 Civic diganti dengan KEWARGANEGARAAN tahun 1961 KEWARGANEGARAAN diganti dengan KEWARGAAN NEGARA atas usul Prof. Dr. Sahardjo, SH sesuai pasal 26 UUD 1945 sebelum di amendemen. Karena civic diganti dengan KEWARGANEGARAAN, maka materi KEWARGANEGARAAN tidak berlaku lagi sehingga materi Civic diganti dengan materi Pancasila, UUD 1945, TAP MPRS, dan PBB, hingga Rezim ORDE BARU. Sejarah Indonesia dan ilmu Bumi berdasarkan instruksi Mendikbud/Dirjendikdas No. 13 Tanggal 28 Juni 1967. Tahun 1972 Civic diganti dengan Ilmu Kewargan Negara sedangkan Civic Education di gantikan PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN disingkat dengan PKn Kurikulum tahun 1975 PKn diganti dengan Pendidikan Moral Pancasila Kurikulum Tahun 1984 PMP tetap. Kurikulum Tahun 1994 PMP dikanti dengan Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan, Kurikulum Tahun 2004, istilah PPKn diganti dengan Pendidikan Kewarganegaraan samapai dengan Kurikulum 2006.

C. PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DALAM KONTEKS PENDIDIKAN NASIONAL (UU RI 20/2003)

Pendidikan Nasional Berfungsi :

Pasal 3 UU RI No 20 Tahun 2003 “ Mengembangkan Kemampuan dan Membentuk Watak Serta Peradaban Bangsa Yang Bermartabat Dalam Rangka Mencerdaskan Kehidupan Bangsa “.

Pendidikan Nasional Bertujuan :

Pasal 3 UU RI No. 20 Tahun 2003 :...Untuk Perkembangan Potensi Peserta Didik Agar Menjadi Manusia Yang Beriman Dan Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa, Sehat, Berilmu, Cakap, Kreatif, mandiri Dan Menjadi Warganegara Yang Demokratis Dan Bertanggung Jawab.

Pasal 37 (1) UU RI no. 20 Tahun 2003 : Dalam penjelasan

“ Pendidikan Kewarganegaraan dimaksud untuk membentuk peserta Didik menjadi Manusia yang memiliki rasa Kebangsaan dan Cinta Tanah Air”.

Visi : Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi Surat Keputusan Dirjen Dikti No. 38/Dikti/Kep/2002 :

Sumber Nilai Dan Pedoman Penyelenggaraan Program Studi Dalam Mengantarkan Mahasiswa Untuk; “ Mengembangkan Kepribadiannya selaku Warganegara yang Berperan Aktif”.

“ Menegakkan Demokrasi Menuju Masyarakat Madani”

Misi : Pendidikan Kewarganegaraan Di Perguruan Tinggi Surat Keputusan Dirjen Dikti No.38/Dikti/Kep./2002 : Membentu mahasiswa selaku warga Negara, agar mampu:

- Mewujudkan Nilai-Nilai Dasar Perjuangan Bangsa Indonesia.
- Mewujudkan Kesadaran Berbangsa Dan Bernegara.
- Menerapkan Ilmunya Secara Bertanggung Jawab Terhadap Kemanusiaan.

Kompetensi Pendidikan Kewarganegaraan Di Perguruan Tinggi Surat Keputusan Dirjen Dikti No. 38/DIKTI/Kep./2002 Bertujuan Untuk Menguasai :

- Kemampuan Berfikir.
 - Bersikap Rasional, Dan Dinamis.
 - Berpandangan Luas Sebagai manusia Intelektual.
- Mengantarkan Mahasiswa Selaku Warganegara, Memiliki :
- a. Wawasan Kesadaran Bernegara, untuk : Bela Negara Dan Cinta Tanah Air.
 - b. Wawasan Kebangsaan, Untuk : Kesadaran Berbangsa Dan mempunyai Ketahanan Nasional.
 - c. Pola Pikir, Sikap yang Komprehensif-Integral pada seluruh Aspek Kehidupan Nasional.
- Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan Di Perguruan Tinggi Berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Dikti No. 38/DIKTI/Kep./2002 agar mahasiswa :**
- a. Memiliki Motivasi menguasai materi Pendidikan Kewarganegaraan.
 - b. Mampu mengkaitkan dan mengimplementasikan dalam peranan dan kedudukan serta kepentingannya, sebagai individu, anggota keluarga/masyarakat dan warganegara yang terdidik.
 - c. Memiliki tekad dan kesedian dalam mewujudkan kaidah-kaidah nilai berbangsa dan bernegara untuk menciptakan masyarakat madani.

D. SEJARAH PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DI INDONESIA SEJAK 1960 SAMPAI SAAT INI :

- Civic/Kewargaan Negara : SMA/SMP 1962, SD 1968, SMP 1969, SMA 1969.
- Pendidikan Kewarganegaraan (PKN) SD 1968, PPSP 1973.
- Pendidikan Moral Pancasila (PMP) SD, SMP, SMA 1975, 1984.
- Pendidikan Pancasila : PT 1970-an-2000-an.
- Pendidikan Kewiraan : PT 1960-an-2001.
- Pendidikan kewarganegaraan: PT 2002-sekarang
- Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan (PPKn) SD, SMP, SMA 1994- Sekarang.
- Pendidikan Kewargaan : IAIN/STAIN 2002-sekarang (rintisan).
- Pendidikan Kewarganegaraan (PKn): SD, SMP, SMA, PT UU No.20 Thn 2003 Tentang SISDIKNAS.
- Kalau jadi nantinya ada peninjauan kembali tentang PKn / Kurikulum Baru kembali kepada Pendidikan Moral Pancasila (PMP) sebagai pelajaran Etika, Moral, Estetika (Ideologi Negara) dan UUD 1945, Norma-norma kehidupan Masyarakat berbangsa dan bernegara.
-

E. MASA PENDIDIKAN KEWIRAAN DI PERGURUAN TINGGI ERA 1960 – 2000

Ada istilah dengan Walawa yaitu wajib latihan mahasiswa, dimasukkan kedalam Ektrakurikuler anatar Universitas di beberapa Perguruan Tinggi Negeri ini pada tahun 1970-an ada menjadi Resimen Mahasiswa Berdasarkan territorial ABRI dengan dibentuknya Yon Resimen Mahasiswa di beberapa perguruan Tinggi seperti Yon Maha Jaya, Maha Surya Dan Seterusnya, dan di jadikan Tamtama Cadangan Nasional (Tentara Cadangan), Memiliki sertifikat berlatih di pusat Militer selama lebih kurang 3 Bulan. Diberikan Pendidikan perwira cadangan kalau sudah menjalani Tugas Akhir. Berdasarkan Surat Keputusan bersama Mendikbud-Menhankam/Pangab Untuk Perguruan Tinggi Nasional no.0228/U/73 dan Keputusan Bersama No. 43/XII/1973 pada tanggal 08 Desember 1973.atau diberi Pendidikan Wajib Militer pada program tertentu seperti Sarjana Muda (Diploma III) setelah selesai dengan pengabdian selama satu tahun di TNI dengan Pangkat Letnan Dua. Atau tamatan pendidikan Istitut Agama

Islam Nasional program sarjana strata satu dengan pangkat Letnan Satu bertugas dengan bimbingan Mental bagi anggota TNI.

F. KONSEPTUAL PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DI DUNIA.

- A. Civics, Civic Education ini di USA.
- B. Citizenship Education ini di Ukraina
- C. Ta'limatul Muwwatanah, Tarbiyatul Al Watoniyah ini di Timur Tengah.
- D. Educacion Civicas ini diajarkan di Mexico.
- E. Sachunternicht ini di ajarkan di Jerman.
- F. Civics, Social Studies ini diajarkan di Australia.
- G. Cocial Studies di ajarkan Negara USA New Zealand.
- H. Life Orientation di ajarkan Negara Afrika Selatan.
- I. People And Society di ajarkan Negara Hongaria.
- J. Civics And Moral Education diajarkan Negara Singapore
- K. Obscesvovedine diajarkan Negara Rusia.

Pendidikan Kewarga Negara sebagai salah satu mata pelajaran tidak bisa berdiri sendiri, tetapi perlu dibantu oleh mata pelajaran lain, salah satunya adalah Pendidikan IPS. Maka pada tahun 1969 Prof. Dr. Sabardjo, SH dengan menerapkan konsep social Studies di AS memasukan unsur Pendidikan IPS di Indonesia. Karena Pendidikan IPS masuk dalam kurikulum tahun 1975. Konsep Tri Social Studies Tradition adalah sebagai berikut :

Social Studies AS Citizenship Transmission untuk menanamkan nilai, sikap budi pekerti yang baik atau good Citizenship. Social Studies As Social Science untuk menanamkan Pengetahuan, kecakapan berpikir, peka terhadap perubahan, Inovatif sesuai dengan prinsip-prinsip ilmu social. Social Studies As Reflective Inquiry untuk membentuk ketrampilan hidup (Life Skills), Tepo Saliro, Tenggangrasa, Empaty dan Simpaty.

Materi pokok Pendidikan Kewarganegaraan adalah menyangkut hubungan antara warga Negara dan Negara serta pendidikan Pendahuluan Bela Negara (PPBN) dalam pelaksanaannya selama ini pada jenjang pendidikan dasar dan Pendidikan menengah, Pendidikan Kewarganegaraan digabung dengan Pendidikan Pancasila menjadi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, sedangkan di perguruan Tinggi pendidikan kewiraan dikenal dengan pendidikan Kewiraan yang lebih menekan pada pendidikan pendahuluna Bela Negara (PPBN). Berdasarkan Menti Pendidikan dan Kebudayaan nomor 056/U/1994 tentang penyusunan kurikulum Perguruan Tinggi dan penilaian Hasil Belajar Mahasiswa menetapkan bahwa, “ Pendidikan Pancasila, Pendidikan Agama dan Pendidikan Kewarganegaraan termasuk dalam mata kuliah umum(MKU) dan wajib diberikan dalam kurikulum setiap program studi.” Dengan demikian Pendidikan Kewiraan tidak hanya berisi PPBN tetapi juga berisikan Pendidikan Kewarganegaraan”. Sebutan mata kuliah umum kemudian diganti dengan sebutan Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MKPK). Dengan penyempurnaan kurikulum tahun 2000, materi pendidikan Kewiraan di samping membahas tentang PPBN juga di tambah dengan pembahasan tentang hubungan antara warganegara dengan Negara. Sebutan Pendidikan “ Kewiraan “ kemudian diganti dengan sebutaan “ Pendidikan KewargaNegaraan “ berdasarkan surat keputusan Dirjen Dikti Nomor 267/DIKTI/2000, Mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan serta pendidikan Pendahuluan Bela Negara (PPBN) merupakan satu komponen yang tidak dapat di pisahkan dari kelompok Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MKPK) dalam susunan Kurikulum inti Perguruan Tinggi di Indonesia.

Selanjutnya bagi Dosen pengampu mata kuliah ini harus di perhatikan rambu-rambu tersebut agar dapat menyusun bahan ajaran pendidikan Kewarganegaraan selanjutnya dan juga diperhatikan Undang-undang nomor 20 Tahun 2003 tentang” Sistem Pendidikan Nasional” tentang dasar fungsi dan tujuan pendidikan sesuai pasal 2 di katakana “ Pendidikan Nasional

Berdasarkan Pancasila Dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “ Selanjutnya Pasal 3 dikatakan “ Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk perkembangannya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab.”

G. PENUTUP

Sesungguhnya Pendidikan Kewarganegaraan adalah mengambil dan sekaligus memberi. Siapa yang belajar hari ini akan dituntut untuk mengajarkannya di masa yang akan datang, siapa yang menerima pendidikan sekarang ini, maka ia akan mendidik orang lain setelah itu. Ibnu Rajab berpendapat bahwa ilmu yang berguna adalah ilmu yang dapat mengendalikan dan menundukkan hati agar mengenal, mengagungkan, memiliki rasa takut, memuliakan dan mencintai Allah. Kalau kita cermati ajaran Ibnu rajab tersebut ilmu bisa mengendalikan apa saja dan mampu mengatasi dan patuh pada apa yang ia tahu. Maka hatinya akan khushyuk dan akan khushyuk juga perbuatannya, sebab kekhusyukan perbuatan mengikuti kekhusyukan cerminan hati. Semua ini dalam kaitannya dengan pendidikan maka pendidikan itu harus dipersiapkan sebagai pendidikan jiwa, pendidikan emosional, etika, moral dan pendidikan keimanan. Adapun ilmu yang tidak disertai amal maka akan menjadi bencana bagi pemiliknya (diri sendiri) karena itu dalam” Al-Quran di jelaskan bahwa orang-orang yang berilmu adalah para ulama yang berbakti dan melaksanakan perintah Allah”. Setelah menguraikan batasan peran dan urgensi pendidikan akhlak dalam pembentukan Individu, masyarakat dan peradaban, samapailah kita pada persoalan yang lebih penting dari itu semua, yakni kita di tuntutan untuk memberikan masukan kepada orang-orang (staff pengajar, pengampu, dosen dan guru) yang bertanggung jawab tentang dunia pendidikan ini. Secara umum mereka adalah Pemerintah, menteri pendidikan, dan jajaran di departemen, pemerhati pendidikan dan pendidik itu sendiri. Permasalahan peranan akhlak dalam pendidikan perlu untuk dibahas dan dimasukkan ke dalam sistem pendidikan dan pengajaran. Dan kebijakkan tersebut kemudian diterapkan secara merata ke tengah-tengah masyarakat, untuk pemerataan ini, Penggunaan bahan ajaran harus menerima saran-saran modern menjadi acuan utama. Meskipun telah di paparkan tentang saran-saran ini dalam pendidikan Kewarganegaraan, Saya memandang perlunya suatu musyawarah dosen-dosen pengampu mata Pelajaran agar dapat memberi suatu masukan yang berarti secara tersendiri dan di akui sejara legal berorientasi kemajuan bangsa dalam bidang akhlak .

DAFTAR PUSTAKA

Tim ICCE UIN Jakarta, 2003, “ Pendidikan Kewargaan (Civic Education) Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani”, Jakarta, diterbitkan oleh ICCE UIN Syarif Hidayatullah bekerja sama dengan The Asia Foundation & PRENADA MEDIA.

H. Subandi Al Marsudi, SH., MH, 2001, “ Pancasila Dan UUD’45 Dalam Paradigma Reformasi,” Jakarta, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada.

Miqdad Yaljan, Dr, 2004, “ Kecerdasan Moral “ Yogyakarta, Penerbit Pustaka FAHIMA.

Hamid Darmadi, Prof. Dr. M. Pd, 2010, “ Pengantar Pendidikan Kewarganegaraan”, Bandung, Penerbit Alfabeta.

Chainur Arrasjid, SH, Dkk, 1998, “ Pancasila Sebagai Filsafat Bangsa Dan Negara “, Medan, Penerbit Yani Corporation.

SEKETARIAT JENDRAL MPR RI, 2011, “ Bahan Tayangan Materi Sosialisasi Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia”, Jakarta.

Suratman, Kolonel TNI (Pur), 1998, Diklat Prajabatan Golongan III, “ Pancasila, UUD 1945, dan BHN”, Jakarta, Penerbit Lembaga Administrasi Negara- Republik Indonesia.

TNI Angkatan Darat Komando Daerah Militer-I Bukit Barisan, 1989, Penataran Personel Pembina Sospol ABRI Kodam I/BB,” Politik Dan Strategi HAMKAMNEG”, Medan.

Tim Laboratorium Pancasila IKIP Malang, 1989, “ Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi, Malang, Penerbit LABORATORIUM PANCASILA IKIP.

C. S. T. Kansil, Drs, SH, 1984, “ Pancasila & Undang-Undang Dasar 1945”, Jakarta Pusat, Penerbit PRADNYA PARAMITA.

Arif Djohan Tunggal, Drs, S.H., 1998, “ Peraturan Perundang-Undangan Kewarganegaraan Republik Indonesia Tahun 1950-1996”, Jakarta, Penerbit HARVARINDO.

C. S. T. Kansil, Prof., Drs.,SH. Dkk, 2003, “ Pancasila Dan UUD 1945 (Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi) “, Jakarta, Penerbit PT PRADNYA PARAMITA.

Departemen Pertahanan Keamanan, 1988, “ Undang-Undang Pertahanan Keamanan Negara Dan Undang-Undang Prajurit ABRI”., Jakarta, Penerbit SEKETARIAT JENDRAL PERTAHANAN KEAMANAN.

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL, 2003, “ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003”, Jakarta, Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia.

SEKETARIAT JENDRAL MPR RI, 2011, “ Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor I/MPR/2003, Tentang Peninjauan Terhadap Materi Dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Dan Ketetapan Majelis

Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 1960 Samapai Dengan Tahun 2002”, Jakarta.

Bobbi Deporter & Mike Hernacki, 2010, “ Quantum Learning(Membiasakan Belajar Nyaman Dan Menyenangkan)”, Bandung, Penerbit Kaifa PT Mizan Pustaka.